

EFEKTIVITAS KINERJA PEJABAT STRUKTURAL DALAM ORGANISASI MITRA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

Sugih Candra Kayat¹

Email: sugih.ck01@gmail.com
STISIP Widyapuri Mandiri

Purwanti Basuki²

STISIP Widyapuri Mandiri

Abstract

Structural officials in partner organizations of the Bandung Regency government play a strategic role in managing and developing regional sports. This study aims to analyze their performance effectiveness and identify supporting factors and challenges faced. Using a descriptive qualitative approach, the findings indicate that performance effectiveness is influenced by individual competence, government policies, and collaboration with sports stakeholders. However, challenges such as budget constraints, complex bureaucracy, and a lack of innovation remain major obstacles. To enhance effectiveness, strategies such as capacity building for human resources, optimizing cross-sector coordination, and leveraging technology in sports governance are necessary.

Keywords: *Performance Effectiveness, Structural Officials, Partner Organizations, Sports, Bandung Regency*

Abstrak

Pejabat struktural dalam organisasi mitra pemerintah Kabupaten Bandung memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan pengembangan olahraga daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kinerja mereka serta mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan yang dihadapi. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kinerja dipengaruhi oleh kompetensi individu, kebijakan pemerintah daerah, serta kerja sama dengan stakeholder olahraga. Namun, beberapa kendala seperti keterbatasan anggaran, birokrasi yang kompleks, dan kurangnya inovasi masih menjadi tantangan utama. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan strategi berupa peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi koordinasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi dalam tata kelola olahraga.

Kata Kunci: Efektivitas Kinerja, Pejabat Struktural, Organisasi Mitra, Olahraga, Kabupaten Bandung

1. Pendahuluan

Efektivitas kinerja pejabat struktural dalam organisasi mitra pemerintah Kabupaten Bandung menjadi aspek penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkelanjutan. Sebagai bagian dari pemerintahan, pejabat struktural memiliki tanggung jawab besar dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi berbagai program yang berfokus pada peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan infrastruktur. Dalam konteks ini, organisasi mitra pemerintah memainkan peran yang tidak kalah penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan dan program-program pemerintah daerah.

Kinerja pejabat struktural dalam organisasi mitra dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adalah kompetensi individu, kualitas kepemimpinan, sistem manajemen organisasi, serta dukungan dari pemerintah daerah, baik dalam hal kebijakan maupun sumber daya. Namun, meskipun memiliki peran strategis, banyak organisasi mitra menghadapi tantangan terkait dengan koordinasi antar lembaga, birokrasi yang kaku, serta keterbatasan anggaran yang dapat menghambat pencapaian target dan hasil yang diinginkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas kinerja pejabat struktural dalam organisasi mitra pemerintah Kabupaten Bandung, dengan fokus pada faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kinerja mereka. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat ditemukan langkah-langkah strategis yang dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas organisasi mitra pemerintah, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan.

2. Kajian Pustaka

Mengenai efektivitas kinerja pejabat struktural dalam organisasi mitra pemerintah mencakup beberapa konsep dan teori yang relevan, antara lain:

- **Teori Kinerja**

Kinerja pejabat struktural sering dikaji berdasarkan teori kinerja yang menekankan pada faktor-faktor seperti kompetensi, motivasi, dan penilaian hasil kerja. Teori ini menjelaskan bahwa kinerja yang efektif bergantung pada kemampuan individu, lingkungan organisasi, dan dukungan dari kebijakan pemerintah.

- **Model Efektivitas Organisasi**

Menurut model efektivitas organisasi, kinerja pejabat struktural dipengaruhi oleh struktur organisasi, proses komunikasi, serta koordinasi antara berbagai pihak terkait. Organisasi yang memiliki struktur yang jelas, proses yang efisien, dan komunikasi yang baik cenderung memiliki kinerja yang lebih efektif.

- **Faktor Pendukung dan Penghambat**

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa faktor pendukung efektivitas kinerja pejabat struktural meliputi kualitas kepemimpinan, sumber daya yang memadai, serta koordinasi yang baik antar lembaga. Sedangkan hambatan utama yang dihadapi antara lain birokrasi yang kompleks, keterbatasan anggaran, dan kurangnya inovasi dalam pengelolaan tugas.

- **Teori Kepemimpinan**

Kepemimpinan yang baik, dengan kemampuan untuk memotivasi dan mengarahkan tim, memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas kinerja. Model kepemimpinan transformasional sering dianggap dapat memotivasi pejabat struktural untuk bekerja lebih optimal.

- **Pengaruh Kebijakan Pemerintah**

Kebijakan pemerintah daerah sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja pejabat struktural, terutama dalam hal alokasi anggaran, peraturan yang mendukung, serta pembaruan dalam sistem manajemen pemerintahan.

a. Beberapa kebijakan yang mendukung efektivitas kinerja pejabat struktural dalam organisasi mitra pemerintah Kabupaten Bandung antara lain:

- **Kebijakan Penguatan Kapasitas SDM** : Pemerintah daerah memberikan pelatihan, pendidikan, dan pengembangan kompetensi kepada pejabat struktural untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka.

Program ini bertujuan agar pejabat struktural memiliki kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan kebijakan secara lebih efisien dan efektif.

- **Kebijakan Penguatan Sistem Manajemen dan Tata Kelola** : Untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan sistem manajemen yang jelas dan transparan. Kebijakan ini mencakup pembaruan dalam struktur organisasi, peningkatan koordinasi antara pejabat struktural dan pemangku kepentingan lainnya, serta penggunaan teknologi informasi untuk mendukung proses administratif dan pengambilan keputusan.
- **Kebijakan Akuntabilitas dan Evaluasi Kinerja** : Penerapan sistem evaluasi kinerja yang objektif dan transparan menjadi salah satu kebijakan penting dalam meningkatkan efektivitas kinerja pejabat struktural. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pejabat struktural tidak hanya bertanggung jawab atas tugas mereka, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
- **Kebijakan Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor** : Kolaborasi antara organisasi mitra pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang terkait sangat penting untuk mengoptimalkan hasil kebijakan. Kebijakan ini berfokus pada penguatan kerja sama antar lembaga, baik di tingkat lokal maupun daerah, untuk mempercepat implementasi program pembangunan dan memastikan keberlanjutan dari kebijakan yang diterapkan.
- **Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Publik** : Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah merupakan hal yang penting untuk mendukung keberhasilan program. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat partisipasi publik dalam berbagai proses pengambilan keputusan, agar kebijakan yang diterapkan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan lebih mudah diterima.

Melalui kebijakan-kebijakan ini, diharapkan dapat tercipta sinergi yang lebih baik antara pejabat struktural dalam organisasi mitra pemerintah dan masyarakat, serta dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan proyek pembangunan di Kabupaten

Bandung. Kebijakan yang tepat akan membawa dampak positif terhadap pencapaian tujuan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah tersebut

Kajian pustaka ini memberikan landasan teoretis yang kuat untuk menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja pejabat struktural dalam organisasi mitra pemerintah Kabupaten Bandung.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **deskriptif kualitatif** untuk menganalisis efektivitas kinerja pejabat struktural dalam organisasi mitra pemerintah Kabupaten Bandung. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

- **Wawancara** dengan pejabat struktural, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya menggunakan teknik purposive sampling.
- **Observasi** langsung terhadap kegiatan pejabat struktural di organisasi mitra.
- **Studi Dokumentasi** untuk mengumpulkan data sekunder berupa laporan kinerja, kebijakan, dan evaluasi program pemerintah.

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan **analisis tematik**, dengan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat efektivitas kinerja. Validitas data akan dijaga melalui teknik **triangulasi**, yaitu membandingkan berbagai sumber dan metode pengumpulan data untuk memastikan keakuratan hasil penelitian.

Metodologi ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja pejabat struktural dalam organisasi mitra pemerintah Kabupaten Bandung.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kinerja pejabat struktural dalam organisasi mitra pemerintah Kabupaten Bandung. Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, berikut adalah hasil utama dan pembahasan dari penelitian ini

Kompetensi Pejabat Struktural : Sebagian besar pejabat struktural di organisasi mitra pemerintah Kabupaten Bandung menunjukkan tingkat kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan dalam aspek keterampilan teknis tertentu yang berhubungan dengan teknologi informasi dan manajemen proyek. Keterbatasan ini berpengaruh pada efektivitas pelaksanaan program

Koordinasi dan Kolaborasi Antar Lembaga : Koordinasi antar lembaga terkait di Kabupaten Bandung menunjukkan hasil yang cukup baik, meskipun ada beberapa kendala dalam implementasi koordinasi lintas sektor. Sering kali terdapat tumpang tindih tanggung jawab, yang mengarah pada kurangnya sinergi antara berbagai pihak yang terlibat. Hal ini mempengaruhi kecepatan dan kelancaran proses implementasi program.

Kebijakan Pemerintah Daerah : Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah, seperti peningkatan kapasitas SDM dan sistem evaluasi kinerja, cukup mendukung efektivitas kinerja pejabat struktural. Namun, tantangan utama terletak pada implementasi kebijakan yang terkadang tidak diikuti dengan alokasi anggaran yang memadai. Keterbatasan anggaran menjadi hambatan signifikan dalam pencapaian tujuan yang lebih besar.

Hambatan dalam Pelaksanaan Program : Beberapa hambatan utama yang ditemukan dalam pelaksanaan program adalah birokrasi yang kompleks dan lambat, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya inovasi dalam pengelolaan program. Hambatan-hambatan ini sering kali menghambat kelancaran dan keberhasilan program pembangunan yang dijalankan oleh organisasi mitra pemerintah.

b. **Pembahasan**

Faktor Pendukung Efektivitas Kinerja : Faktor-faktor pendukung utama yang ditemukan adalah kualitas kepemimpinan pejabat struktural, yang memainkan peran kunci dalam memotivasi tim dan mempercepat proses implementasi. Selain itu, kebijakan pemerintah daerah yang fokus pada pelatihan dan pengembangan SDM juga berperan penting dalam meningkatkan kemampuan pejabat struktural untuk melaksanakan tugas dengan lebih efektif.

Hambatan dan Tantangan : Meskipun terdapat beberapa faktor pendukung yang signifikan, hambatan-hambatan seperti birokrasi yang kompleks dan anggaran yang

terbatas menjadi penghambat utama dalam meningkatkan efektivitas kinerja. Birokrasi yang kaku memperlambat proses pengambilan keputusan, sementara keterbatasan anggaran mengurangi kapasitas lembaga dalam melaksanakan program secara optimal.

Rekomendasi untuk Peningkatan Kinerja : Untuk meningkatkan efektivitas kinerja pejabat struktural dalam organisasi mitra pemerintah Kabupaten Bandung, disarankan untuk melakukan beberapa langkah, antara lain:

- **Peningkatan Kapasitas SDM** melalui pelatihan dan pendidikan yang lebih intensif, terutama dalam hal teknologi informasi dan manajemen proyek.
- **Optimasi Koordinasi Antar Lembaga**, dengan memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab agar tidak terjadi tumpang tindih yang menghambat proses kerja.
- **Pemanfaatan Teknologi** dalam tata kelola pemerintahan untuk mempercepat proses administrasi dan pengambilan keputusan.
- **Peningkatan Alokasi Anggaran** untuk mendukung program-program pembangunan yang lebih efektif dan efisien.

5. Kesimpulan

Secara keseluruhan, efektivitas kinerja pejabat struktural dalam organisasi mitra pemerintah Kabupaten Bandung dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan hambatan. Meskipun terdapat upaya yang signifikan untuk meningkatkan kinerja melalui kebijakan dan penguatan kapasitas SDM, tantangan seperti birokrasi yang kompleks dan keterbatasan anggaran masih menjadi hambatan utama yang perlu diatasi untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Daftar Rujukan

Rujukan Buku:

- Abdullah, A. (2016). *Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Pemerintah*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Davis, K., & Newstrom, J. W. (2004). *Organizational Behavior: Human Behavior at Work*. 11th ed. New York: McGraw-Hill.
- Hersey, P., Blanchard, K. H., & Johnson, D. E. (2013). *Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources*. 10th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2004). *Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes*. Boston: Harvard Business Press.
- Mulyasa, E. (2004). *Manajemen Kinerja di Sektor Publik*. Bandung: Rosda Karya.
- Rasyid, I. (2012). *Kinerja Pejabat Struktural dan Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sedarmayanti, M. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Sutrisno, E. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- Widodo, W. (2019). *Penerapan Kebijakan Pengembangan SDM dalam Organisasi Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Wibowo, A. (2013). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rujukan Jurnal:

- Awan, H. M., & Bhatti, M. A. (2017). *Effectiveness of Public Sector Managers: An Empirical Analysis of Organizational Performance*. *Journal of Public Administration*, 42(3), 445-460.
- Hasibuan, M. S. P. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Kinerja Organisasi: Tinjauan Teori dan Praktik*. *Journal of Management and Development*, 6(1), 65-80.
- Kusnadi, R., & Anggraini, D. (2015). *Evaluasi Kinerja Pejabat Struktural dalam Organisasi Pemerintah Daerah*. *Jurnal Administrasi Negara*, 14(2), 99-110.
- Lestari, A., & Ningsih, N. (2019). *Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pejabat Struktural di Pemerintahan Daerah*. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(4), 121-134.

- Rini, S. (2017). *Implementasi Kebijakan Peningkatan Kinerja Pejabat Struktural dalam Pemerintahan Daerah di Kabupaten X*. *Jurnal Administrasi Negara*, 11(3), 201-215.
- Sutrisno, E., & Wibowo, A. (2020). *Evaluasi Kinerja Pejabat Struktural di Sektor Publik: Perspektif Manajemen dan Organisasi*. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 5(2), 92-105.
- Widodo, W., & Riyadi, Y. (2018). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pejabat Struktural dalam Organisasi Pemerintah*. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 78-91.
- Yuliana, N., & Setiawan, A. (2016). *Peran Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Kinerja Pejabat Struktural pada Pemerintahan Daerah*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 7(2), 115-130.

Rujukan Prosiding:

- Rahmawati, S. (2019). *Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pejabat Struktural dalam Organisasi Pemerintahan Daerah*. *Prosiding Seminar Nasional Manajemen dan Kebijakan Publik*, 3(1), 34-45.
- Santoso, T., & Fadli, S. (2018). *Penerapan Model Kinerja untuk Meningkatkan Efektivitas Organisasi Pemerintah Daerah*. *Prosiding Konferensi Nasional Manajemen Sumber Daya Manusia*, 5(2), 210-223.
- Andriani, D., & Fitriani, M. (2017). *Evaluasi Kinerja Pejabat Struktural di Pemerintahan Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Bandung*. *Prosiding Seminar Internasional Administrasi Publik*, 4(3), 102-112.
- Wibowo, F., & Nugroho, E. (2020). *Strategi Pengembangan SDM untuk Meningkatkan Efektivitas Kinerja Pejabat Struktural dalam Pemerintahan Daerah*. *Prosiding Simposium Nasional Manajemen dan Kebijakan Publik*, 8(1), 76-85.
- Setiawan, Y., & Purwanto, A. (2016). *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Kinerja Pejabat Struktural pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung*. *Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumber Daya Manusia*, 2(4), 150-160.
- Kusnadi, R., & Hidayat, T. (2017). *Manajemen Kinerja Pejabat Struktural dalam Pemerintahan Daerah: Pendekatan Organisasi dan Kepemimpinan*. *Prosiding Konferensi Internasional Administrasi Publik*, 6(2), 125-135.
- Widodo, T., & Oktaviani, D. (2015). *Peran Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Kinerja Pejabat Struktural di Organisasi Mitra Pemerintah*. *Prosiding Kongres Nasional Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 80-90.

Rujukan Sumber Online :

Badan Kepegawaian Negara (BKN). (2021). *Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam Organisasi Pemerintah.* Diakses dari <https://www.bkn.go.id/peningkatan-kinerja-pegawai>

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(KemenPAN-RB). (2020). *Peraturan Tentang Evaluasi Kinerja Pejabat Struktural dalam Pemerintahan Daerah.* Diakses dari <https://www.menpan.go.id/aturan-evaluasi-kinerja-pejabat-struktural>

Jurnal Administrasi Publik Online. (2019). *Kinerja Pejabat Struktural di Pemerintah Daerah: Tinjauan dan Analisis.* Diakses dari <http://www.jurnaladminpublik.com/kinerja-pejabat-struktural>

Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM). (2021). *Peningkatan*

Investasi untuk Mendukung Pembangunan Daerah. Diakses dari <https://www.bkpm.go.id/peningkatan-investasi-daerah>

Universitas Indonesia. (2018). *Strategi Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Sektor Publik.* Diakses dari <https://www.ui.ac.id/strategi-pengelolaan-sdm>

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri). (2020).

Panduan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kinerja. Diakses dari <https://www.kemendagri.go.id/panduan-pengelolaan-kinerja>

World Bank. (2020). *Public Sector Performance: Evaluating the Role of Organizational Leadership.* Diakses dari <https://www.worldbank.org/en/topic/public-sector-performance>

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2019). *Evaluasi*

Kinerja Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Layanan Publik. Diakses dari <https://www.bappenas.go.id/evaluasi-kinerja-pemda>